

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1990
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum, Dalam Fred N. Kerlinger, Asas Asas Penelitian Behavioral, diterjemahkan landung R. Simatupang*, 2006
- Bratakusumah, S. Deddy, Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Christine, S, T, Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia hukum administrasi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta 2008.
- Dedi Suharyadi, *Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor*, Volume 5 No. 2 Oktober 2018
- Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *kamus lengkap bahasa Indonesia karangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Fred N. Kerlinger,, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004
- Garys Keraf, *argumentasi dan Narasi*, Jakarta: Gramedia, 2001

- Harkristuti Harkrisnowo, "Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan", Artikel pada *Jurnal Keadilan* Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983
- Ilham Bisri, *Sistim Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993
- I Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996
- J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional, ed. Kesepuluh (1)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989
- K. J.L. Brierly, *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Moh. Radjah, Bhratata, Jakarta, 1996
- L. Joseph Goldstein dalam Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Khaidir Anwar, *Hukum Internasional II*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011
- Luhut M.P Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Adhoc; Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009
- Mariot P. Siahaan. *Pajak Daerah dan retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintah Daerah; Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta, 2006
- M. H. Tirtaadmijaya, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Fasco, Jakarta, 1995
- N. Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007
- Marbun BN, *Kamus Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cet. ke-9, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Madju, 1994.
- N. Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003
- O. Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi”, Makalah dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Indonesia, FHUI, Jakarta, 1993
- P. Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994
- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*; Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013

- Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Pres, 2003
- Remington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Jakarta, 1996
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta 2010
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dilengkapi Dengan 4 Undang- Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta 2011
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia. Jakarta. Jakarta. 1998 Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta, 1981
- Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- Tim Lopera, *Otonomi Pemberian Negara Kajian Kritis Atas Kebijakan Otonomi Daerah*, Lopera Pusataka Utama, Yogyakarta, 200
- Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2007.
- Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2012
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Peraturan-perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Advokat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi

Daerah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan tata Usaha Negara

Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2010 tentang Perencanaan Strategik
dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015



